

EKSISTENSI DAN INDEPENDENSI SURAT KABAR DALAM KOMUNIKASI POLITIK PADA PILKADA DALAM RANGKA PENDIDIKAN DEMOKRASI

Edi Saputra

Dosen UPT-MKU Universitas Negeri Padang
edi_saputra@yahoo.co.id

ABSTRACT

Theoretically, in the context of the establishment of the democratic process, the existence of newspapers in political communication on the elections should be independent. It means that newspapers should be able to investigate in a professional, freely without bias from any parties, be objective in reporting the facts or events that occurred in the elections so as to form an opinion that does not harm anyone in increasing confidence of the people for making their choices. Methodologically, the independence of a newspaper can be measured by the Content Analysis Method in the editorial, whether the editor has the discretion to review the news, issues, or events that occur in the elections, or whether it was influenced or not influenced by certain parties, particularly candidates in the elections. In addition, the independence of the newspapers can also be seen from the attitude of the editor in the editorial, whether it be supportive, neutral, or not being supportive.

Keywords: *Existence, independency, political communication, local elections, democratic process.*

ABSTRAK

Secara teoritis, dalam rangka tegaknya proses demokrasi, eksistensi surat kabar dalam komunikasi politik pada pilkada harus independen. Artinya, surat kabar harus bisa menginvestigasi secara profesional, bebas tanpa adanya keberpihakan pada pihak manapun, objektif dalam melaporkan fakta-fakta ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Pilkada sehingga mampu membentuk opini yang tidak merugikan siapapun dalam menambah keyakinan rakyat untuk menentukan pilihannya. Secara metodologis Independensi suatu surat kabar dapat diukur dengan metode analisis isi (*Content Analysis Method*) pada tajuk rencana yakni, apakah editor memiliki keleluasaan dalam mengulas berita, isu ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pilkada dipengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh pihak tertentu, terutama kandidat pilkada. Selain itu, independensi surat kabar dapat juga dilihat dari sikap editor dalam menulis tajuk rencana apakah bersikap mendukung, netral dan tidak mendukung.

Kata Kunci: *Eksistensi, Independensi, komunikasi politik, Pilkada, proses demokrasi*

A. Pendahuluan

Media massa merupakan salah satu alat komunikasi dan berperan besar dalam upaya memperlancar proses terjadinya komunikasi. Menurut

Effendy¹ media massa dapat diartikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas media massa adalah semua media yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang, baik yang disampaikan secara tertulis ataupun secara lisan. Dalam batasan ini termasuk surat kabar, radio, televisi dan film. Dalam arti sempit adalah media massa cetak, seperti surat kabar, majalah dan bulletin.

Surat kabar mempunyai ciri khas tersendiri yaitu; a) *Publisitas*, diperuntukkan untuk umum. b) *Universalitas*, memuat berita mengenai kejadian di seluruh dunia dan segala aspek kehidupan manusia. c) *Aktualitas*, kecenderungan penyampaian laporan mengenai kejadian di masyarakat kepada khalayak. Dengan demikian surat kabar dapat menyampaikan pesan-pesan yang canggih dan ilmiah sehingga sering dijadikan ajang polemik oleh para cendekiawan yang menyajikan pemikirannya. Surat kabar lebih banyak ditujukan kepada rasio atau pikiran².

Sejalan dengan berjalannya waktu maka surat kabar tidak hanya berfungsi sebagai alat informasi saja tetapi banyak fungsi yang dapat diberikan oleh surat kabar. Effendy³ menjelaskan fungsi-fungsi dari surat kabar yakni: a) Menyiarkan informasi (*to inform*) kepada khalayak mengenai berbagai peristiwa yang terjadi

serta berbagai pikiran atau gagasan yang disampaikan orang lain. Khalayak pembaca menjadi pembeli ataupun berlangganan surat kabar karena ingin mengetahui informasi apa yang terjadi di berbagai tempat di dunia; b) Mendidik (*mass education*) yaitu, sebagai pendidikan masyarakat. Surat kabar secara tidak langsung memberikan fungsi pendidikan pada pembacanya. Ini bisa dilihat dari materi isi seperti artikel, fitur (*feature*) dan juga tajuk. Materi isi tersebut disamping memberikan informasi juga menambah perbendaharaan pengetahuan pembacanya walaupun bobot pemahaman tiap pembaca berbeda-beda; c) Menghibur (*to entertain*). Hiburan yang ditampilkan surat kabar berguna untuk melemaskan ketegangan para pembacanya. Hiburan ini dapat berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang, pojok, karikatur, dan juga berbagai fitur. Isinya dibuat seringan mungkin sehingga tidak menimbulkan pemikiran serius bagi pembacanya; d) Mempengaruhi (*to influence*). Berita pada surat kabar secara tidak langsung mempengaruhi para pembacanya, sedangkan tajuk rencana dan artikel dapat memberikan pengaruh langsung kepada pembacanya. Pengaruh ini pada mulanya timbul dari persepsi pembaca terhadap suatu masalah yang kemudian membentuk opini pada pembacanya.

Dalam fungsi mempengaruhi inilah, terlihat keterkaitan surat kabar dengan komunikasi politik yaitu, surat kabar tidak hanya berperan sebagai sumber informasi, medium pendidikan, hiburan dan pengamat

¹ Effendy, Onong Achjana. 2004. *Ilmu Komunikasi. Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.

² *Ibid*

³ *Ibid*

lingkungan tetapi juga mempunyai hubungan yang erat dengan dunia politik. Hal ini disebabkan karena artikulasi politik tidak akan terlepas dari persoalan “*siapa yang mengatakan apa, “melalui media mana”, ditunjukan kepada siapa, dengan pengaruh yang bagaimana*”⁴.

Lebih tegas lagi Harold Laswell⁵ mengatakan bahwa komunikasi dalam artikulasi politik tidak terlepas dari persoalan “*siapa yang mengatakan apa, “melalui media mana”, ditunjukan kepada siapa, dengan pengaruh yang bagaimana*”. Dengan demikian, surat kabar dalam komunikasi politik merupakan media komunikasi yang menyalurkan “*siapa yang menyampaikan apa, ditunjukan kepada siapa dan dengan pengaruh yang bagaimana*”.

Dalam proses Pilkada, terjadi proses komunikasi dalam artikulasi politik ini yakni dimana kandidat sebagai pihak “*siapa yang mengatakan apa*” akan berusaha sekuat tenaga untuk mempengaruhi rakyat agar memilih mereka. Sementara itu, rakyat sebagai pihak “*ditunjukan kepada siapa dengan pengaruh yang bagaimana*” akan memilih gambar-gambar kandidat yang mereka anggap sanggup memperjuangkan nasibnya. Di sini lah surat kabar sebagai media komunikasi politik “*melalui media mana*” menyalurkan pesan-pesan politik kandidat tersebut pada semua kalangan.

⁴ Nimmo, Dan. 1993. *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.

⁵ Dalam Nimmo, Dan. 1993. *Ibid*

Menurut Sudijono⁶ kelancaran komunikasi politik ini dipengaruhi oleh independensi surat kabar sebagai penyalur aspirasi, gagasan, pandang-pandangan politik baik dari pemerintah maupun dari rakyat. Artinya, surat kabar seharusnya berpihak kepada “*semua*” tanpa memandang status dan kedudukan sosialnya. Intinya surat kabar tersebut hendaknya bukan “*menjilat*” kepada “*siapa*”, tetapi justru mengkritik “*semua*” yang tidak benar. Dapat dikatakan surat kabar harus bersikap independen, diberi kebebasan untuk bersuara seobjektif mungkin meliputi peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga semua pihak dapat menerima masukan dari semua kalangan.

Dengan demikian eksistensi surat kabar dalam komunikasi politik pada saat berlangsungnya Pilkada adalah surat kabar yang menyalurkan pesan-pesan politik kandidat “*siapa yang mengatakan apa, ditunjukan kepada siapa dengan pengaruh yang bagaimana*” dituntut untuk bersikap independen sehingga pesan-pesan politik para kandidat tersebut bisa dinilai oleh rakyat apakah hanya mewakili kepentingan kelompok dari partai politik mereka sendiri atau memperjuangkan aspirasi rakyat. Dengan adanya independen dari surat kabar tersebut, rakyat bisa lepas dari jerat-jerat manipulasi politik berupa janji-janji politik yang mempengaruhi pilihan mereka nantinya.

Eksistensi surat kabar saat berlangsungnya pilkada untuk tegak-

⁶ Sudijono, Sastro Atmojo. 1995. *Prilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Perss.

nya proses demokratis adalah surat kabar yang independen sebagai media komunikasi politik, yaitu surat kabar yang bisa menginvestigasi jalannya Pilkada dan melaporkannya pada rakyat tanpa adanya keberpihakan. Di suatu daerah yang melaksanakan Pilkada, mungkin saja tidak semua rakyat bisa mengetahui jalannya Pilkada tersebut. Dalam hal ini surat kabar berperan untuk memberitahukan apa yang ditemukannya sehingga rakyat bisa memilih ataupun bertindak. Dalam Pilkada yang demokratis, rakyat punya harapan pada surat kabar untuk memantapkan pilihannya. Dapat dikatakan bahwa tak ada Pilkada yang sukses tanpa adanya peranan surat kabar, salah satu ciri Pilkada yang kotor adalah tidak adanya independensi dari surat kabar.

B. Permasalahan

Pada masa Orde Baru surat kabar sebagai media komunikasi politik belum dapat bersikap independen. Menurut Jamiluddin Ritonga⁷ surat kabar melakukan itu bukan karena kehendaknya tetapi, mendapat tekanan dari pihak yang berkuasa. Pada masa Orde Baru surat kabar bergelut dengan sistem politik tertutup dan lebih mendahulukan kepentingan pihak yang berkuasa. Untuk itu surat kabar lebih dominan memberitakan kegiatan-kegiatan seremonial para pejabat pemerintah mulai dari pusat hingga daerah sehingga surat kabar dan pemerintah melalui

⁷ Dalam *Media Indonesia*, 11 Mei 2000.

Golkar memiliki hubungan *pater-nalistic*.

Pada masa reformasi, dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap surat kabar *Harian Umum Singgalang* pada masa pilkada 2005 oleh Edi Saputra tahun 2013 surat kabar kembali independen. Edi Saputra mengemukakan bahwa:

Berdasarkan analisis isi pada tajuk rencana *Harian Umum Singgalang* yang terbit pada masa kampanye Pilkada 2005 di Sumatera Barat dapat dikatakan bahwa *Harian Umum Singgalang* independen sebagai media komunikasi politik. Hal ini bisa di lihat pada; *pertama*, dalam penulisan tajuk rencana editor tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, terutama cagub/cawagub, tetapi memiliki keleluasaan untuk menyampaikan pandangan, ide dan pendapatnya terhadap masalah yang diulas. Walaupun dalam penulisannya mendukung pendapat seseorang tetapi hanya bermaksud untuk memperjelas persoalan tidak untuk mendukung kandidat tertentu dalam kampanye Pilkada sehingga tidak mempengaruhi independensinya. *Kedua*, dalam mengulas suatu permasalahan yang timbul saat kampanye, *Harian Umum Singgalang* bersikap netral dengan memperjelas dan memperluas perspektif masyarakat terhadap persoalan⁸.

Dengan demikian dapat dikatakan, pada saat reformasi dengan adanya Pilkada surat kabar kembali

⁸ Edi Saputra. 2013. "Independensi *Harian Umum Singgalang* dalam Komunikasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sumatera Barat". *Jurnal Tinkap*, edisi IX no. 2 tahun 2013.

independen, bebas, dan bertanggung-jawab menyampaikan pesan-pesan politik. Pesan-pesan politik yang disampaikan kembali bervariasi, mampu membentuk opini publik dalam memperkuat keyakinan-keyakinan politik individu atau masyarakat dalam memilih nantinya. Dengan demikian pesan-pesan politik tersebut tentu saja tidak berasal dari salah satu kandidat tetapi juga berasal dari pesan-pesan politik para cagub/cawagub lainnya.

Akan tetapi pada saat Pemilihan Presiden (Pilpres 2014) kemaren nampak surat kabar kehilangan independensinya. Untuk itu tulisan ini mencoba menguraikan bagaimana “Eksistensi dan Independensi Surat Kabar dalam Komunikasi Politik pada Pilkada dalam rangka Pendidikan Demokrasi.

C. Pembahasan

Komunikasi Politik

Komunikasi politik terdiri dari kata komunikasi dan politik⁹. Lasswell¹⁰ mengatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan mendasar; *who says what in which channel to whom with what effect?*. Laswell ingin menyebut bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu.

Dengan demikian dalam komunikasi terjadinya pertukaran pesan

antara dua pihak yakni, sebagai proses dimana pesan-pesan ditransfer dari suatu sumber kepada penerima. Sumber mentransfer pesan-pesannya dengan tujuan untuk merubah tingkah laku dari penerima. Namun, sumber pun bisa berubah tingkah lakunya sebagai akibat umpan timbal balik yang diterimanya dari penerima. Dapat dikatakan komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan informasi berupa lambang yang mengandung arti atau makna sampai menjadi milik bersama.

Sedangkan politik menurut Nimmo¹¹ merupakan kegiatan yang secara kolektif mengatur perbuatan manusia dalam kondisi konflik sosial. Setiap manusia, dipandang politik selalu berbeda dan hal itu yang menyebabkan konflik. Manusia berselisih, memperkenalkan masalah, dan menyelesaikannya maka, itulah politik. Lebih jauh, Nimmo memberikan kesimpulan pandangan Mark Roelofs bahwa “komunikasi meliputi politik”. Bila orang mengamati konflik, mereka menurunkan makna perselisihan itu melalui komunikasi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik mencakup sesuatu kegiatan yang dialami orang. Politik adalah kegiatan orang secara kolektif yang menyatukan pembicaraan dan pandangan dalam kondisi konflik sosial. Dengan kata lain politik adalah pembicaraan; tegasnya, kegiatan berpolitik adalah berbicara.

Dari dua pengertian kata di atas dapat dikatakan bahwa komunikasi

⁹ Nimmo, Dan, 1993. *Op cit.*

¹⁰ Effendy, 2004. *Op cit.*

¹¹ Nimmo, Dan, 1993. *Op cit.*

politik adalah komunikasi yang bercirikan politik yang terjadi di dalam sebuah sistem politik. Dalam komunikasi politik sekelompok orang (partai politik) dengan segala struktur yang tersedia menjalankan fungsi mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik. Komunikasi politik dapat berbentuk penyampaian pesan-pesan yang berdampak politik dari sekelompok orang ataupun pemerintah kepada rakyat ataupun sebaliknya.

Menurut Richard Fugen¹² komunikasi politik adalah suatu aktivitas komunikasi yang membawa konsekuensi-konsekuensi politik, baik yang aktual maupun yang potensial di dalam suatu sistem politik yang ada. Konsekuensi-konsekuensi politik yang terjadi bisa bernilai positif dan bisa juga bernilai negatif. Oleh karena itu berbagai konsekuensi politik yang terjadi pada dasarnya mengandung arti agar sistem politik yang ada bisa berfungsi.

Sedangkan menurut Harmoko¹³ komunikasi politik merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik. Di dalam sistem politik, komunikasi politik berfungsi sebagai penghubung antara situasi kehidupan

politik yang ada pada suprastruktur politik dengan infrastruktur politik yang dapat dipakai untuk menciptakan kondisi kehidupan politik yang stabil

Lebih lanjut Harsono¹⁴ mengartikan komunikasi politik dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas komunikasi politik ditekankannya pada penyampaian informasi politik dan suatu sumber kepada sasarannya. Sedangkan dalam arti sempit dikaitkannya dengan struktur kekuasaan yang ada. Lebih lengkapnya pengertian itu adalah sebagai berikut:

Komunikasi politik dalam arti luas yaitu setiap bentuk-bentuk penyampaian pesan-pesan politik, baik berupa lambang-lambang, kata-kata terucapkan atau tertulis ataupun melalui pesan-pesan visual, baik secara langsung ataupun tidak kepada sejumlah sasaran. Dalam arti sempit komunikasi politik adalah setiap bentuk penyampaian pesan-pesan, baik berupa lambang-lambang, kata-kata terucapkan ataupun tertulis, baik visual maupun isyarat yang dapat mempengaruhi secara langsung ataupun tidak kedudukan seseorang yang berada dalam puncak suatu struktur kekuasaan tertentu dan yang ada dalam suatu sistem.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa komunikasi politik adalah suatu penyampaian pesan-pesan politik, terutama pesan-pesan yang dilambangkan dengan menggunakan bahasa dalam arti yang luas. Pesan-pesan yang dimaksud

¹² Dalam Harsono, Suwardi, 1993. *Peranan Pers dalam Politik di Indonesia. Suatu Studi Komunikasi Politik Terhadap Liputan Berita kampanye Pemilu 1987*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

¹³ Rauf, Maswadi dan Mappa Nasrun. 1993. *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Jakarta: Gramedia.

¹⁴ *Ibid*

adalah pesan-pesan yang menggunakan elemen bahasa seperti lagu, berita, informasi, pernyataan yang berkaitan dengan sistem nilai kepercayaan dan pendapat serta bisa juga bentuk interpretasi dan kritik oleh wartawan atau oleh yang lainnya.

Surat Kabar dalam Komunikasi Politik pada Pilkada

Media massa dalam bahasa Inggris disebut dengan kata “*mass media*” bermakna alat penghubung. Media massa merupakan salah satu alat komunikasi dan berperan besar dalam melancarkan terjadinya komunikasi tersebut. Dapat dikatakan media massa adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau berita secara serentak kepada khalayak banyak, berbeda dan tersebar diberbagai tempat.

Menurut Effendy¹⁵ media massa dapat diartikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas adalah semua media massa yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang, baik yang disampaikan secara tertulis ataupun secara lisan. Dalam batasan ini termasuk surat kabar, radio, televisi dan film. Dalam arti sempit adalah media massa cetak, seperti surat kabar, majalah dan bulletin. Dengan kata lain arti media massa mengarah kepada alat yang di pergunakan untuk menyampaikan informasi

Perbedaan media massa cetak dan media elektronik adalah bahwa media massa elektronik menyampai-

kan pesan-pesan sifatnya sekilas sehingga khalayak harus selalu berada di depan pesawat televisi dan radio. Oleh karena itu pesan-pesan disampaikan harus mudah dicerna oleh pendengar atau pemirsa. Media massa cetak pesan-pesannya ditulis seperti surat kabar, majalah dan bulletin¹⁶.

Media massa khususnya surat kabar mempunyai ciri khas tersendiri yaitu: a) *Publisitas*, diperuntukan untuk umum. b) *Universalitas*, memuat berita mengenai kejadian di seluruh dunia dan segala aspek kehidupan manusia. c) *Aktualitas*, kecenderungan penyampaian laporan mengenai kejadian di masyarakat kepada khalayak. Dengan demikian surat kabar dapat menyampaikan pesan-pesan yang canggih dan ilmiah sehingga sering dijadikan ajang polemik oleh para cendekiawan yang menyajikan pemikirannya. Surat kabar lebih banyak ditujukan kepada rasio atau pikiran¹⁷.

Sejalan dengan berjalannya waktu maka surat kabar tidak hanya berfungsi sebagai alat informasi saja tetapi banyak fungsi yang dapat diberikan oleh surat kabar. Effendy¹⁸ menjelaskan fungsi-fungsi dari surat kabar yakni: a) Menyiarkan informasi (*to inform*) kepada khalayak mengenai berbagai peristiwa yang terjadi serta berbagai pikiran atau gagasan yang disampaikan orang lain; b) Mendidik (*mass education*), yaitu sebagai pendidikan masyarakat; c)

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁵ Effendy, 2004. *Op cit*.

Menghibur (*to entertain*). Hiburan ditampilkan surat kabar berguna untuk melemaskan ketegangan para pembacanya; dan d) Mempengaruhi (*to influence*).

Sementara itu dalam kaitannya dengan komunikasi politik, surat kabar tidak hanya berperan sebagai sumber informasi, medium pendidikan, hiburan dan pengamat lingkungan tetapi juga mempunyai hubungan yang erat dengan dunia politik. Hal ini disebabkan dalam artikulasi, politik tidak akan terlepas dari persoalan “*siapa yang mengatakan apa, “melalui media mana”, ditunjukkan kepada siapa, dengan pengaruh yang bagaimana*”¹⁹. Dengan demikian surat kabar dan politik khususnya komunikasi politik tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua sisi yang tidak dapat dijauhkan satu sama lainnya.

Dalam usaha mempertahankan kekuasaan misalnya, pemerintah yang berkuasa akan berusaha mempengaruhi surat kabar. Sebaliknya, surat kabar bisa menjadi penekan terhadap pemerintahan yang berkuasa karena keluasan jangkauannya di dalam masyarakat. Surat kabar dapat menciptakan opini publik (*publik opinion*) yang membangun persepsi masyarakat menjadi positif atau negatif terhadap kebijakan politik yang ditetapkan.

Robert Michels²⁰ mengemukakan bahwa surat kabar merupakan

¹⁹ Nimmo, Dan. 1993. *Op cit.*

²⁰ Dalam Delvivia. 1999. *Analisa Isi Liputan Berita Pemilu 1971 di Sumatera Barat, Studi Kasus Dalam Harian Haluan. Skripsi Sarjana.* Padang: FPIPS IKIP Padang.

alat yang berpotensi kuat dalam merebut, mengawetkan, dan mengkonsolidasikan kekuasaan para pemimpin. Daniel Lev juga mengemukakan tiga kemungkinan hubungan surat kabar dalam politik yang dianut oleh masyarakat suatu negara yakni: a) Sebagai alat penerang belaka yakni, di dalam mana pemerintah atau suatu golongan yang kuat di dalam masyarakat bisa mempunyai atau mengontrol surat kabar itu. Ini berarti surat kabar hanya untuk menyiarkan berita-berita yang *cukup* buat keperluan masyarakat tersebut; b) Surat kabar dapat dipakai sebagai alat mobilisasi oleh elite politik atau elite sosial. Dimana, surat kabar tersebut dapat untuk melahirkan nilai-nilai (mungkin nilai baru atau nilai baru) yang akan mengkompakkan dan menggerakkan masyarakat untuk mencapai sesuatu. c) Surat kabar sebagai alat kontrol. Di dalam fungsinya yang ketiga ini terlihat kompleksitasnya peranan surat kabar di dalam masyarakat. Surat kabar sebagai alat kontrol bukan hanya berarti alat pengontrol pemerintah saja tetapi juga alat pengontrol terhadap masyarakat kaum intelektual, rakyat biasa, golongan sosial yang biasanya tidak senang dikontrol dan terhadap industri surat kabar itu sendiri.

Dari tiga fungsi tadi akan melahirkan citra bagi surat kabar itu yaitu, gambaran tentang realitas surat kabar berdasarkan kepentingan yang dilayaninya. Dengan demikian surat kabar yang melayani kepentingan bisnis memiliki citra sebagai surat kabar bisnis. Demikian pula surat kabar yang melayani kepentingan

politik memperoleh citra sebagai surat kabar politik. Surat kabar yang melayani kepentingan pemerintah digambarkan sebagai surat kabar pemerintah. Surat kabar yang melayani perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat memiliki citra surat kabar perjuangan²¹.

Secara teoritis terdapat keterkaitan antara surat kabar dengan komunikasi politik, yaitu dengan menggunakan dua pendekatan. *Pertama*, surat kabar dipandang sebagai sumber kekuasaan yang dapat mempengaruhi kehidupan politik. *Kedua*, surat kabar yang memiliki ketergantungan dari kehidupan politik seperti terlihat dalam studi mengenai sistem surat kabar dan pembredelan surat kabar. Kedua pendekatan ini berakar dari dua sudut pandang berbeda. Pendekatan pertama bertolak dan sudut pandang serba media, sebaliknya pendekatan kedua bertumpu pada pandangan serba masyarakat²².

McQuail²³ menulis bahwa secara umum pandangan serba media itu menekankan keperkasaan surat kabar sebagai kekuatan penggerak perubahan, baik melalui teknologi maupun isi yang dibawanya sehingga institusi lainnya harus melakukan penyesuaian terhadap tekanan yang dilakukan beserta dampaknya. Pandangan serba masyarakat mene-

kankan ketergantungan institusi surat kabar kepada kekuatan lain dalam masyarakat terutama kepada politik atau uang. Lebih lanjut McQuail menulis bahwa ketergantungan timbal balik antara institusi yang memegang kekuasaan dengan integrasi surat kabar terhadap sumber kekuasaan. Dengan demikian isi surat kabar cenderung melayani pemegang kekuasaan politik dan ekonomi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa surat kabar dapat dikendalikan atau dikelola secara monopolistik untuk dijadikan sebagai alat utama yang efektif dalam mengorganisasi massa atau kelompok, konsumen, pasar dan biasanya merupakan corong penguasa, pemberi pendapat dan instruksi serta kepuasan jiwa.

Jamiluddin Ritonga²⁴ menulis bahwa surat kabar pada Orde Baru mengedepankan agenda kebijaksanaan. Surat kabar saat itu bergelut dengan sistem politik tertutup lebih mendahulukan kepentingan pihak yang berkuasa. Surat kabar melakukan itu bukan karena kehendaknya tetapi disebabkan mendapatkan tekanan dari pihak yang berkuasa. Akibat tekanan dari pihak pemerintah tersebut menyebabkan surat kabar tidak berdaya melakukan fungsinya sebagaimana mestinya. Surat kabar terpaksa mengikuti selera penguasa.

Hal ini sesuai dengan teori *agenda setting*. Teori ini berpendapat, surat kabar yang menganut sistem tertutup dominan akan mengedepankan agenda kebijakan umumnya lebih dominan menyuarakan kepentingan

²¹ Arifin, Anwar. 1992. *Komunikasi Politik dan Pers Pancasila*. Jakarta: Yayasan Media Sejahtera.

²² *Ibid*

²³ McQuail, Denis. 1996. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Erlangga.

²⁴ Dalam *Media Indonesia*, 11 Mei 2000.

negara khususnya pemerintah yang berkuasa. Di sini surat kabar lebih banyak memberitakan kegiatan-kegiatan seremonial para pejabat pnerintah mulai dan pusat sampai ke daerah-daerah. Akibatnya, surat kabar sebagai kontrol sosial yang merupakan salah satu fungsinya tidak berjalan secara optimal. Malah, surat kabar menyediakan dirinya sebagai alat komunikasi bagi pemerintah²⁵.

Hal ini dapat dilihat dalam dua bentuk kampanye Pilkada yaitu dialog tatap muka langsung dan melalui media massa seperti surat kabar. Dalam dialog langsung calon gubernur langsung bertatap muka dengan calon pemilih, melakukan dialog, jabat tangan (bersalaman) dan bercanda. Kegiatan kampanye seperti ini tidak lepas dari perhatian surat kabar untuk diliputnya. Pada kampanye melalui media yang ada seperti surat kabar dimana, calon kepala daerah berusaha menonjolkan kelebihan masing-masing, menyampaikan misi dan visinya, program-programnya dan lain sebagainya melalui tulisan dalam surat kabar.

Untuk itu dalam kampanye Pilkada surat kabar sering dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Pemanfaatan surat kabar oleh *stakeholder* dalam kampanye Pilkada ialah *pertama*, menjadikan surat kabar sebagai komunikasi langsung dari pasangan calon kepala daerah kepada masyarakat pemilih. Dalam hal ini

surat kabar dipakai sebagai alat promosi untuk memperkenalkan pasangan calon kepala daerah seperti, pada saat menjelang hari pemilihan banyak gambar yang telah ditampilkan di surat kabar dari setiap calon kepala daerah. *Kedua*, surat kabar dimanfaatkan sebagai program berita (informasi khusus). Dalam hal ini surat kabar memberitakan tentang calon dan segala hal yang menyangkut pemilu dan membangun citra positif terhadap pasangan calon kepala daerah. *Ketiga*, surat kabar berperan sebagai sarana sosialisasi Pilkada atau informasi pendidikan untuk pemilih, informasi ini menyangkut partisipasi pemilih, proses pemilihan, cara memilih dan lain sebagainya²⁶.

Komunikasi Politik Pada Pilkada dalam Rangka Pendidikan Demokrasi

Pemilu merupakan suatu metode untuk menterjemahkan pilihan rakyat ke dalam kursi-kursi badan perwakilan. Pemilu juga merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Pada zaman modern ini pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal yaitu: (1) pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan; (2) pemilu menjadi indikator negara demokrasi dan tidak ada

²⁵Zunni. M. 2000. "Kecenderungan Singgalang Terhadap OPP dalam Kampanye Pemilu 1992 & 1997 Suatu Analisa Isi". Padang: Skripsi Sarjana FIS UNP.

²⁶Prihatmoko, Joko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

satu pun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa pelaksanaan pemilu; dan (3) pemilu penting dibicarakan terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dalam pelaksanaannya seperti terhadap rezim, hak-hak politik rakyat dan sirkulasi elit²⁷.

Sementara itu Samego²⁸ mengemukakan bahwa pemilu sebagai salah satu elemen kedaulatan rakyat merupakan even politik yang penting karena: (1) pemilu merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap negara modern dalam rangka menegakkan dan mempertahankan sistem politik demokrasi; (2) pemilu adalah lembaga demokrasi untuk mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan rakyat; (3) pemilu yang dijalankan secara demokratis akan menghasilkan badan-badan perwakilan yang aspiratif karena tidak dipilih berdasarkan manipulasi, kecurangan-kecurangan atau melalui pemaksaan birokrasi.

Dari berbagai pendapat di atas secara umum dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan di tangan rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilu dalam sebuah negara yang demokratis menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Dalam tatanan demokrasi, baik itu pemilu legislatif, pemilu

presiden maupun kepala daerah akan dapat menegakkan proses demokrasi dan upaya pendidikan demokrasi itu sendiri. Berikut ini akan dijelaskan tentang pilkada secara langsung dalam upaya pendidikan demokrasi bagi masyarakat.

Menurut undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan kepala daerah atau sering disebut sebagai Pilkada adalah sebuah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia yang dilaksanakan secara langsung oleh penduduk setempat yang memenuhi syarat. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah: a) Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, b) Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, c) Walikota dan Wakil Walikota untuk kota.

Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik yang telah memenuhi persyaratan. Pilkada langsung yang disebutkan dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sebelumnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyelenggara Pilkada dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Pilkada langsung yang mulai dilaksanakan tahun 2005 merupakan proses pembelajaran kehidupan demokrasi paling besar sepanjang sejarah Pilkada di Indonesia. Eksperimentasi demokrasi Pilkada langsung terus diupayakan untuk tegaknya demokrasi. Pilihan terhadap Pilkada

²⁷ Sigit Pamungkas. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Gajah-mada.

²⁸ Samego, Indria. 1998. *Pemilu dan Demokrasi*. Jakarta: LIPI.

langsung menjadi momentum untuk mempertegas aura optimisme dalam tegaknya proses demokrasi. Melalui Pilkada langsung, rakyat tidak hanya menjadi objek politik tetapi sekaligus sebagai subjek yang menentukan pemimpin mereka secara demokratis²⁹.

Dapat dikatakan Pilkada langsung merupakan mekanisme tegaknya proses demokrasi, merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah. Dalam Pilkada, rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon kepala daerah yang didukungnya. Calon-calon kepala daerah tersebut bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama sehingga proses demokrasi akan tegak.

Menurut Prihatmoko³⁰ peluang untuk mewujudkan tegaknya proses demokrasi dalam Pilkada langsung adalah: *Pertama*, adanya prinsip kedaulatan rakyat dimana melalui Pilkada langsung rakyat akan menentukan sendiri kepala daerah dan wakil kepala daerah pilihannya. *Kedua*, adanya azas-azas pemilihan yang demokratis yaitu azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. *Ketiga*, diselenggarakan oleh lembaga independen yang mandiri dan bebas dari intervensi pihak manapun. *Keempat*, adanya rekrutmen politik yang terbuka dengan diberikannya kesempatan kepada calon independen

melalui partai politik ataupun perseorangan untuk berkompetisi. *Kelima*, adanya akuntabilitas publik baik terhadap proses/tahapan penyelenggaraan Pilkada maupun terhadap aparat penyelenggara Pilkada langsung. *Keenam*, adanya mekanisme pengawasan oleh panitia pengawas dan auditor publik. *Ketujuh*, adanya badan peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam menangani sengketa Pilkada.

Peluang tegaknya proses demokrasi tersebut dengan mekanisme Pilkada langsung dalam kaitannya dengan komunikasi politik dapat dilihat pada tahap ketiga dari enam tahapan pelaksanaan Pilkada yakni tahap kampanye. Lengkapnya tahapan Pilkada tersebut adalah: a) Penetapan daftar pemilih; b) Pendaftaran dan penetapan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah; c) Kampanye; d) Pemungutan suara; e) Penghitungan suara; f) Penetapan pasangan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan³¹.

Pada tahap ketiga pelaksanaan Pilkada dilakukan kampanye untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program para pasangan calon. Dalam kampanye inilah kegiatan komunikasi politik meningkat, semarak dan melibatkan banyak orang. Kegiatan ini dilakukan menjelang pemilihan gubernur. Dengan demikian kampanye merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu

²⁹Mubarok, Mufti. 2005. *Sukses Pilkada*. Surabaya: PT Java Pustaka Media Utama.

³⁰Prihatmoko, Joko. 2005. *Op cit*.

³¹*Ibid*

untuk memperoleh dukungan politik dari rakyat.

Kampanye ini diatur dengan peraturan-peraturan tersendiri yaitu waktu, tata caranya, pengawasan dan sanksi-sanksi jika terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan kampanye tersebut. Dengan demikian, kampanye adalah kegiatan yang bersifat formal dalam sebuah perebutan jabatan-jabatan politik tertentu. Dalam kampanye, biasanya semua bentuk komunikasi politik dikembangkan seperti agitasi politik, propaganda politik, *public relations* politik, dan retorika politik³².

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komunikasi yang bercirikan politik terjadi di dalam kampanye Pilkada merupakan komunikasi politik. Artinya, dalam komunikasi politik pada Pilkada, cagub/cawagub atau partai politik pendukungnya dengan segala struktur yang tersedia menjalankan fungsi komunikasi, berupa informasi, isu-isu dan gagasan-gagasan bertepatan politik. Tegasnya, komunikasi politik dalam Pilkada dapat berbentuk penyampaian pesan-pesan yang berdampak politik dari cagub/cawagub atau partai politik pendukungnya kepada rakyat pemilih atau sebaliknya, salah satu caranya adalah dengan jalan kampanye.

Dalam kampanye terdapat tiga sasaran politik yaitu *pertama*, membangkitkan kesetiaan alami para pengikut suatu partai agar tetap memilih sesuai dengan kesetiaan itu. *Kedua*, menggalang rakyat (pemilih)

yang tidak terikat dengan partai tertentu atau menciptakan pendukung dari golongan independen. *Ketiga*, meyakinkan rakyat (pemilih) dari partai lain, bahwa keadaan akan lebih baik jika mereka menjatuhkan pilihan kepada kandidat dari partai lain³³.

Pelaksanaan kampanye dalam menjalankan ketiga sasaran di atas, memerlukan manajemen yang rapi sehingga dapat dikembangkan menjadi sebuah kampanye yang total. Hal ini harus dimulai dengan perumusan gagasan vital atau tema kampanye yang persuasif, disusun perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi sehingga tujuan yang efektif dan efisien dapat tercapai.

Penyusunan gagasan vital atau tema kampanye diserahkan kepada pemikir atau konseptor. Kemudian, pengorganisasiannya diserahkan kepada organisator. Sedangkan penyebaran gagasan tersebut dilaksanakan oleh para komunikator politik, terdiri dari politikus profesional dan aktivis yang mempunyai kemampuan sebagai orator (*public relations officer*). Komunikator politik pada umumnya adalah orang yang memiliki kemampuan membawa massa atau pengikut kepada tujuan tertentu.

Hal ini menurut Mochtar Pabottinggi³⁴ disebabkan dalam praktek proses komunikasi politik pada kampanye Pilkada sering mengalami empat distorsi yaitu: *Pertama*, distorsi bahasa sebagai

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

³⁴ Dalam Rauf, Maswadi dan Mappa Nasrun. 1993. *Op cit*.

“topeng”, di sini ada *euphemism* (penghalusan kata), bahasa yang menampilkan sesuatu lain dari yang dimaksudkan atau berbeda dengan situasi sebenarnya. *Kedua*, distorsi bahasa sebagai “proyek lupa”, lupa sebagai sesuatu yang dimanipulasikan, lupa dapat diciptakan dan direncanakan bukan hanya atas satu orang, melainkan atas puluhan bahkan ratusan juta orang. *Ketiga*, distorsi bahasa sebagai “representasi”, terjadi bila melukiskan sesuatu tidak sebagaimana mestinya seperti gambaran buruk kaum Muslimin dan orang Arab oleh media Barat. *keempat*, distorsi bahasa sebagai “ideologi”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komunikasi politik dalam kampanye pada Pilkada merupakan suatu penyampaian pesan-pesan politik terutama pesan-pesan yang dilambangkan dengan menggunakan bahasa dalam arti yang luas. Pesan-pesan yang dimaksud adalah pesan-pesan politik yang menggunakan elemen bahasa seperti lagu, berita, informasi, pernyataan yang berkaitan dengan sistem nilai kepercayaan dan pendapat serta bisa juga bentuk interpretasi dan kritik oleh wartawan atau oleh yang lainnya.

D. Penutup

Eksistensi dan independensi surat kabar merupakan hal yang sangat penting dalam komunikasi politik pada Pilkada dalam rangka pendidikan demokrasi. Disadari atau tidak, surat kabar sering dimanfaatkan oleh para kandidat sebagai

media komunikasi politik pada masyarakat pemilih. Dalam hal ini, surat kabar dipakai sebagai alat promosi untuk memperkenalkan pasangan kandidat, seperti pada saat menjelang hari pemilihan banyak gambar yang telah dipampangkan oleh kandidat tertentu. Surat kabar juga menulis berita-berita mengenai kelebihan kandidat tertentu bahkan, surat kabar yang tidak independen dalam tajuk rencananya mengajak untuk memilih kandidat tertentu.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa eksistensi dan independensi surat kabar dalam komunikasi politik pada Pilkada dalam rangka pendidikan demokrasi ialah surat kabar yang bisa menginvestigasi jalannya Pilkada dan melaporkannya pada rakyat tanpa adanya keberpihakan. Di suatu daerah yang melaksanakan Pilkada, mungkin saja tidak semua rakyat bisa mengetahui jalannya Pilkada tersebut. Dalam hal ini surat kabar berperan untuk memberitahukan apa yang ditemukannya sehingga rakyat bisa memilih ataupun bertindak. Dalam Pilkada yang demokratis rakyat punya harapan pada surat kabar untuk memantapkan pilihannya. Dapat dikatakan bahwa tak ada Pilkada yang sukses tanpa adanya peranan surat kabar. Salah satu ciri Pilkada yang kotor adalah tidak adanya independensi dari surat kabar tersebut.

Untuk itu surat kabar ditantang untuk menjaga eksistensinya dan independensinya, integritas profesionalnya sebagai penyebar informasi, membentuk opini publik, mendidik, menghibur dan melaksanakan sosial kontrolnya. Surat kabar dalam

komunikasi politik pada Pilkada haruslah bekerja secara professional, bebas, jujur, adil, berintegritas, objektif melaporkan fakta-fakta yang tidak merugikan pihak mana pun. Disamping itu, surat kabar juga dapat berperan kritis dalam kepentingan

pendidikan umum dalam meningkatkan peran serta pemilih secara kelompok seperti, petani yang selama ini memiliki minat yang lebih rendah atau memilih golput, surat kabar seharusnya mendorong golongan ini untuk ikut terlibat dalam Pilkada.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arifin, Anwar. 1992. *Komunikasi Politik dan Pers Pancasila*. Jakarta: Yayasan Media Sejahtera.
- Delvivia. 1999. *Analisa Isi Liputan Berita Pemilu 1971 di Sumatera Barat, Studi Kasus Dalam Harian Haluan. Skripsi Sarjana*. Padang: FPIPS IKIP Padang.
- Edi Saputra. 2013. "Independensi Harian Umum Singgalang dalam Komunikasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sumatera Barat". *Jurnal Tingkap*, edisi IX no. 2 tahun 2013.
- Effendy, Onong Achjana. 2004. *Ilmu Komunikasi. Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.
- Harsono, Suwardi, 1993. *Peranan Pers dalam Politik di Indonesia. Suatu Studi Komunikasi Politik Terhadap Liputan Berita kampanye Pemilu 1987*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- McQuail, Denis. 1996. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Erlangga.
- Mubarok, Mufti. 2005. *Sukses Pilkada*. Surabaya: PT Java Pustaka Media Utama.
- Nimmo, Dan. 1993. *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.
- Prihatmoko, Joko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rauf, Maswadi dan Mappa Nasrun. 1993. *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Samego, Indria. 1998. *Pemilu dan Demokrasi*. Jakarta: LIPI.
- Sigit Pamungkas. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Gajahmada.
- Sudijono, Sastro Atmojo. 1995. *Prilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Perss.

Zunni. M. 2000. "Kecenderungan Singgalang Terhadap OPP dalam Kampanye Pemilu 1992 & 1997 Suatu Analisa Isi". Padang: Skripsi Sarjana FIS UNP.